

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2026

Jl. Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan

Tanjungpandan - Bangka Belitung 33414

Telp. 071921060 Fax. 071921060

e-mail : pntanjungpandan@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni TA 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan

Telp. 071921060 Fax. 071921060

Tanjungpandan - Bangka Belitung 33414

e-mail : pntanjungpandan@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

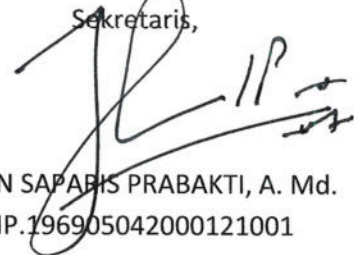
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



ILMAN SAPARIS PRABAKTI, A. Md.

NIP.196905042000121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	28
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	36
B.2. Belanja	37

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan

Jl. Sriwijaya No. 1 Tanjungpandan Tanjungpandan - Bangka Belitung 33414

Telp. 071921060 Fax. 071921060 e-mail : pntanjungpandan@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

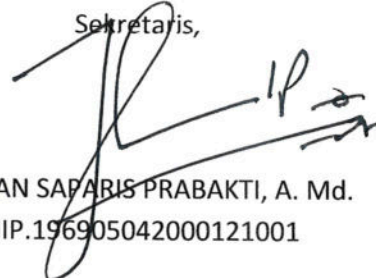
Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



ILMAN SAFARIS PRABAKTI, A. Md.

NIP.196905042000121001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.29,744,150 atau mencapai 204 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.14,559,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp.7,333,174,282 atau mencapai 60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.12,145,219,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni TA 2026 dan 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagai mana telah di

ubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Jumlah Aset Lancar per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp28,677,150 Aset tetap berupa tanah Rp32,199.474.000 Tanah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2,453,170,931 Gedung dan Bangunan sebesar Rp28,203,643,578 Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0, Aset tetap lainnya sebesar Rp9,559,628, Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp0 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(12,729,031,766) jumlah Aset Tetap sebesar Rp50,136,816,371.

Dana yang dibatasi Penggunaannya Rp0 Aset Lain-lain Rp 767,000, Akumulasi Penyusutan/Amortisi Aset Lainnya Rp(767,000) Jumlah Aset Lainnya Rp0 Jumlah Aset Rp50,165,493,521, Utang kepada Pihak ketiga Rp656,362,159, Utang yang belum ditagihkan Rp7,548,258 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp683,910,417 Jumlah Kewajiban Rp683,910,417 Uang yang belum ditagih sebesar Rp7,548,258 dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp20,000,000 Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp51,569,279,155 sebesar Rp, Surplus/Defisit – Lo Rp(9,402,947,412) Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp0 Penyesuaian Nilai Aset Rp0 Selisih Revaluasi Aset Rp0 Koreksi Nilai Aset Rp0 Lain-lain Rp0 Transaksi Antar Entitas Rp7,315,251,361 Kenaikan /Penurunan Ekuitas Rp(2,087,696,051) Ekuitas Akhir sebesar Rp49,481,583,104.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non Operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Surplus/Defisit - LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp ((9,434,150,362) Pendapatan Penerimaan Negara bukan pajak lainnya Rp12,733,950 Jumlah pendapatan Rp12,733,950 Beban Pegawai Rp6,041,998,580 Beban Persediaan Rp31,747,150 Beban Barang Jasa Rp477,261,843 Beban pemeliharaan Rp246,781,017 Beban perjalanan Dinas Rp43,172,850 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2,593,188,922 Jumlah Beban Rp9,434,150,362 jumlah Surplus/Defisit pelepasan aset Rp619,000 Pendapatan pelepasan asset Rp619,000 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional lainnya Rp17,850,000, pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya Rp17,850,000 Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Rp0 Jumlah Surplus/Defisit dai kegiatan Non Operasional Rp18,469,000 Surplus/Defisit sebelum

pos luar biasa Rp(9,402,947,412) Pos luar biasa Rp0 Beban luar biasa Rp0 Pos luar biasa Rp0 Surplus/Defisit-LO Rp(9,402,947,412) dan tahun 2025 Rp(5,407,862,970).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp51,569,279,155 surplus (defisit)-LO sebesar Rp(9,402,947,412) kemudian koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuintas Rp0 Penyesuan Nilai Aset Rp 0 Selisih Nilai Aset Non Revaluasi Rp0 Lain-lain Rp 0 Transaksi Antar Entitas Rp7,315,251,361 Kenaikan Penurunan Ekuintas Rp(2,087,696,051) Ekuintas Akhir sebesar 30 Juni 2026 Rp49,481,583,104.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai aset, kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 - DAN 30 JUNI 2025 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 JUNI 2026			30 JUNI 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14,559,000	29,774,150	204	318,781,172
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	10,369,498,000	6,504,293,141	63	2,240,906,592
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,760,721,000	815,981,121	48	478,624,082
3.	Belanja Modal	B.2.3.	15,000,000	12,900,000	99	0
	Jumlah Belanja Negara		12,145,219,000	7,333,174,262	60	2,719,530,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

NERACA

PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2026

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	20,000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	1,458,800	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	3.	1,458,000	0
Persediaan	C.1. 4.	7,218,350	0
Persediaan yang Belum Diregester	C.1. 5.	0	0
Jumlah Aset Lancar		28,677,150	0
Aset Tetap	C.2	0	0
Tanah	C.2. 1.	32,199,474.000	32,199,474,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,453,170,931	2,426,760,932
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	28,203,643,578	28,203,643,578
Aset tetap Lainnya	C.2. 4.	9,559,628	9,559,628
AKUMULASI PENYUSUSTAN	C.2. 5.	(12,729,031,766)	(10,134,154,094)
JUMLAH ASET TETAP	C.2. 6.	50,136,816,371	52,705,284,044
Akumulasi Penyusutan	C.2. 7.	0	0
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaanya	C.2. 8.	0	0
Aset Lain-lain	C.2. 9.	767.000	767.000
AKUMULASI PENYUSUSTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	10.	(767,000)	(767,000)
Jumlah Aset lainnya	C.2. 10.	0	0
Jumlah Aset	C.2. 11.	50,165,493,521	52,705,294,044

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga	C.3. 1.	656,362,159	1,136,004,889
Utang Yang Belum ditagihkan	C.3. 2.	7,548,256	0
Uang Muka dari KPPN	C.3. 3.	20,000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		683,910,417	1,136,004,889
JUMLAH KEWAJIBAN		683,910,417	1,136,004,889

EKUITAS

Ekuitas	C.4. 1.	49,481,583,104	51,569,279,155
Jumlah Ekuintas	C.4. 2.	49,481,583,104	57,925,961.282
Jumlah Kewajiban Dan Ekuintas	C.4. 3.	50,165,493,521	52,705,284,044
Penyesuain Nilai Aset	C.4. 4.	0	0
Selisih Revaluasi Aset	C.4. 5.	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	C.4. 6.	0	0
Lain Lain	C.4. 7.	0	0
Transaksi Antar Entitas	C.4. 8.	0	0
Kenaikan/Penurunan Ekuintas	C.4. 9.	0	0
Jumlah Ekuitas Akhir		50,165,493,521	52,705,284,044

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 - DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12,733,950	203,514,079
Jumlah Pendapatan		12,733,950	203,514,079
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	6,041,998,580	2,495,251,484
Beban Persediaan	D. 3	31,747,150	36,086,025
Beban Barang dan Jasa	D. 4	477,261,843	319,439,500
Beban Pemeliharaan	D. 5	246,781,017	128,181,982
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	43,172,850	26,368,600
Beban Barang Yang harus Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bunga	D. 8	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 10	2,593,188,922	2,607,358,551
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		9,434,150,362	5,612,686,142
Beban Penyisihan dari Piutang Tak Tertagih	D. 12	0	
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	D. 13	(9,421,416,412)	(5,409,172,063)
Surflus/Defisit Pelepasan Aset		619,000	1,309,000
Pendapatan Pelepasan Aset		619,000	1,309,000
Surflus/Defisit dari kegiatan operasiona lainnya	D. 14	17,850,00	93
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	D. 15	17,850,00	93

Beban Pelepasan Aset	0	0
----------------------	---	---

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	18,469,000	1,309,093
--	------------	-----------

Jumlah surplus (defisit) sebelum Pos luar biasa	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)
---	-----------------	-----------------

Surplus / (Defisit) -LO	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)
-------------------------	-----------------	-----------------

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 16
----------------	-------

Pendapatan PNB	0	0
----------------	---	---

Beban Perjalanan Dinas	0	0
------------------------	---	---

Beban Persediaan	0	0
------------------	---	---

Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)
---------------------------------------	-----------------	-----------------

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 - DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI TA 2026	30 JUNI TA 2025
Ekuitas Awal	E. 1	51,569,279,155	57,925,961,282
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi mendasar		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(178,707,385)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	7,315,251,361	2,400,749,502
Kenaikan/Penurunan Ekuintas	E. 9	(2,087,696,051)	(3,007,133,468)
Diterima dari Entitas lain	E.10	0	0
Ditagihkan ke entitas lain	11	0	0
Ekuitas Akhir		49,481,583,104	54,918,847,814

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan

Visi Pengadilan Negeri Tanjung Pandan adalah : **Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjungpandan Klas II yang Agung.**

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

Visi Mahkamah Agung adalah : **TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai pada pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Misi Pengadilan Negeri Tanjung Pandan adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tanjungpandan Klas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di PengadilanNegeriTanjungpandanKlas II
4. Meningkatkan kredibilitas dantransparasi di pengadilanNegeriTanjungpandanKlas II

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pandan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana Strategis dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan sbb :

Uraian :

- 1.Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2.Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
- 3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- 5.Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
- 6.Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator :

- 1.Persentase Mediasi yang menjadiakta perdamaian
- 2.Persentesisa perkara yang diselesaikan
- 3.Persentase Perkara yang diselesaikan
- 4.Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktumaksimal 5 bulan
- 5.Persentaseperkara yang diselesaikandalamjangkawaktulebih5bulan
- 6.Persentaseperkara yang tidakmengajukanupayahukum
- 7.Persentaseberkas yang diajukanbanding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
- 8.Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- 9.Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan

para pihak

10.Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

11.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

12.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Kebijakan :

1.Peningkatan kinerja peradilan

2.Pengembangan Sistem Informasi PN Tanjungpandan terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan

3.Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan

Program :

1.Peningkatan Manajemen Peradilan

2.Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

3.Peningkatan Manajemen Peradilan

4.Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

5.Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

5.Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan :

1.Penyelesaian Administrasi Perkara

2.Bimbingan / Pembinaan Penanganandan Penyelesaian Perkara

3.Percepatan penyelesaian perkara

4.Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

5.Register dan pendistribusian berkas perkara kemajelis tepat waktu

6.Penyediaan dan prodeo di pengadilan tingkat pertama.

7.Mengoptimisasikan fungsi pelaksanaan siding keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat.

8.Tercapainya kegiatan standar layanan public yaitu putusan perkara yang dapat dipublikasikan

9.Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan, reviu atas laporan keuangan

11.Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat peradilan di wilayah PN Tanjungpandan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	- Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah :
Rp.14,559,000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp29,744,150 atau mencapai 204 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 14,559,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	EstimasiPendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,559,000	29,744,150	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	
Total Pendapatan	14,559,000	29,744,150	

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 30 Juni TA 2026 mengalami penurunan sebesar 1678.24 % Rp289,037,022 dibandingkan 30 Juni TA 2025 hal ini disebabkan karena :
1.Adanya penurunan aktivitas jasa sewa rumah dinas
2.Adanya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan
Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni TA 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2026	2025	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28,203,643,578	28,203,643,578	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja yang lalu	0	0	0	
Total Pendapatan		28,203,643,578	28,203,643,578	0	0,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp
Rp7,333,174,262

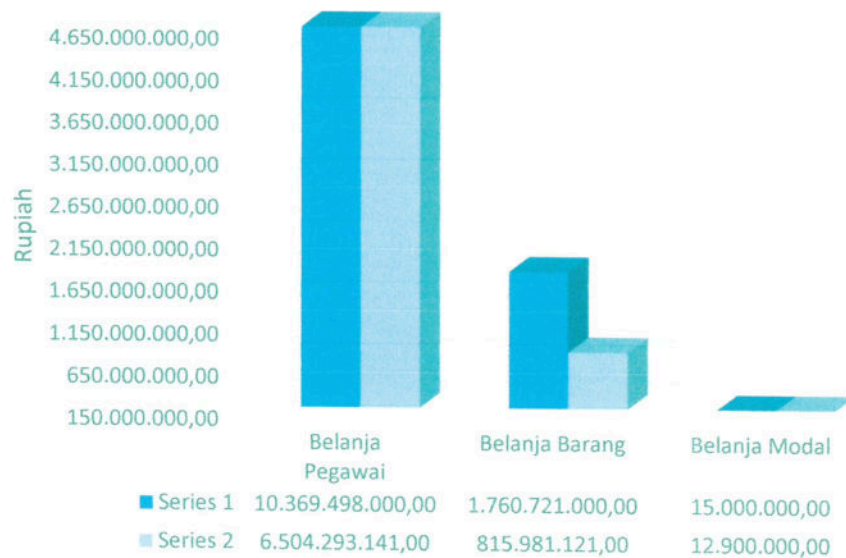
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Tanjungpandan per 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp7,333,174,262 atau sebesar 60 % dari anggaran senilai Rp12,145,219,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada per 30 Juni TA 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10,369,498,000	6,504,293,141	63
Belanja Barang	1,760,721,000	815,981,121	48
Belanja Modal	15,000,000	12,900,000	86
Total Belanja Bruto	12,145,219,000	7,333,174,262	60
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	12,145,219,000	7,333,174,262	60

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2026 & 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp(4,812,044,738) atau sebesar 63 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama kenaikan tersebut disebabkan karena :

- 1.Adanya Kenaikan belanja pegawai sebesar Rp(3,865,204,859)
- 2.Adanya kenaikan belanja barang dan Jasa sebesar Rp(944,739,879)
- 3.Adanya penurunan Biaya Modal sebesar Rp(2,100,000)

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni TA 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	6,504,293,141	2,240,906,592	4,263,386,549	63
Belanja Barang	815,981,121	478,624,082	337,357,039	46
Belanja Modal	12,900,000	0	12,900,000	100
Total Belanja	7,333,174,262	2,719,530,674	4,613,643,586	60

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp2,240,906.5
92

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Pandan per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp2,240,906.592 dan Rp1,952,578.311.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 mengalami Kenaikan sebesar (1,371,570.408) dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2025 Hal ini disebabkan antara lain:

- 1.Belanja Beban Pokok PNS sebesar Rp851,643,500.
- 2.Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp11,557.
- 3.Belanja Tunjangan Suami/Istri sebesar Rp56,121,674.
- 4.Belanja Tunjangan Anak sebesar Rp16,868,822.
- 5.Belanja Struktural PNS sebesar Rp12,160,000.
- 6.Belanja Fungsional PNS sebesar Rp28,560,000.
- 7.Belanja Tunjangan Pph PNS sebesar Rp5,293,478.
- 8.Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp43,958,940.
- 9.Tunjangan Uang Makan PNS Rp116,095,000.

10. Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp11,680,000.
11. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim sebesar Rp64,800,000.
12. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Rp1,052,896,302.
13. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Rp4,080,900,000.
14. Belanja Gaji Pokok PPPK Rp119,303,825.
15. Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp2,980.
16. Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK Rp3,641,674.
17. Belanja Tunjangan Anak PPPK Rp1,921,554.
18. Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp6,825,585.
19. Belanja Uang Makan PPPK Rp23,742,000.
20. Belanja Tunjangan Umum PPPK Rp7,866,250.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI TA 2026	30 JUNI TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	851,643,500	1.383,839,480	95,533,420	12,78
Beban Pembulatan Gaji PNS	11,557	100.900	3,819	35,72
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56,121,674	93.610,860	8,047,560	16,15
Beban Tunj. Anak PNS	16,868,822	27.915,250	1,075,996	6,70
Beban Tunj. Struktural PNS	12,160,000	28.140,000	2,010,000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	28,560,000	1.411,799,000	310,800,000	50,33
Beban Tunj. PPh PNS	5,293,478	147.269,968	50,416,507	78,32
Beban Tunj. Beras PNS	43,958,940	80.313,780	11,949,300	32,03
Beban Uang Makan PNS	116,095,000	242.620,000	(1,585,000)	(1,40)
Beban Tunjangan Umum PNS	11,680,000	10.610,000	(960,000)	(19,21)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	145.800,000	31,050,000	54,76
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,052,896,302	0	0	0,00
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,080,900,000	0	0	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	119,303,825	0	0	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.980			
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,641,674	0	0	0,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,921,554			

Total Belanja Brutto	815,981,121	478,624,082	337,357,039	60
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	815,981,121	478,624,082	337,357,039	55

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal :
Rp12,900,000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Tanjungpandan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp12,900,000 dan Rp0

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal	12,900,000	0	(2,100,000)	86
Total Belanja Brutto	0	0	0	00,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	12,900,000	0	(2,100,000)	86

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp28,677,150

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp28,677,150 dan Rp0

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	TA 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000.000	0
Piutang Bukan Pajak	1,458,800	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETO)	1,458,800	0
Persediaan	7,218,350	0
Total Aset Lancar	28,677,150	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp20,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung jawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

Jumlah	20,000,000	0
--------	------------	---

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0.*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0.dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2026	TA 2025
1	NIHIL	-	-

Jumlah	-	-
--------	---	---

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp7,218,350*

Persediaan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp7,218,350 dan Rp0 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025

No.	Uraian	30 Juni TA 2026	TA 2025
1	Persediaan	7,218,350	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0

	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	7,218,350	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 tersaji sebesar Rp50,136,816,371 dan Rp52,705,284,044 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Perubahan
1	Tanah	32,199,474.000	32,199,474.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,453,170,931	2,426,760,932	26,409,999
3	Gedung dan Bangunan	28,203,643,578	28,203,643,578	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9,559,628	9,559.628	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Aset lain-lain	767,000	767,000	0
8	Akumulasi Penyusutan	(12,729,031,766)	(10,134,154,094)	(2,594,877,672)
9.	Dana yang dibatasi penggunaannya	0	0	0
10.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	(767,000)	(767,000)	0
	Jumlah Aset lainnya	0	0	0
	Jumlah Aset Tetap	50,165,493,521	52,705,284,044	(4,82)
	Jumlah Aset	50,165,493,521	52,705,284,044	(4,82)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.32,199,474,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp32,199,474.000 dan Rp32,199,474.000 Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian saldo Tanah

No.	KTB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						32,199,474,000

Pada Pengadilan Negeri Tanjungpan dan tidak mengalami Nilai perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dikarenakan tidak adanya penambahan pengadaan tanah yang baru di kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan sampai dengan untuk tahun 2025

C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan
Mesin : Rp
2,453,170,931**

Nilai PerolehanPeralatandanMesin per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalahsebesar Rp2,453,170,931 dan Rp2,426,760,932.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

**Gedung dan
Bangunan :
Rp28,203,643,578**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp28,203,643,578 dan Rp28,203,643,578.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2025		0
Mutasi Tambah		
Mutasi Kurang		
Saldo per 30 Juni 2026		0

Nilai Buku 30 Juni 2026	0
-------------------------	---

Nilai perolehan Aset Tetap lainnya berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 .dan Rp.0 Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mengalami perubahan pada Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Depresiasi 30 Juni 2026	
Nilai Buku TA 2026	0

Pengadilan Negeri Tanjungpandan mempunyai Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dan tidak ada perubahan saldo untuk periode 30 Juni 2026.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap

Jumlah Aset : Rp
50,165,493,521

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp50,165,493,521 dan Rp52,705,284,044 pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan adanya Mengalami Perubahan untuk periode 30 Juni 2026

Mutasi nilai Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Penyusutan/Am
ortisasi Aset
Lainnya :
Rp(767,000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp(767,000) dan Rp(767,000)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini ;

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	32.199,474,000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.453,170,931	26,409,999	1.09
3	Gedung dan Bangunan	28,203,643,578	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.559,628	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(12,729,031,766)	(2,594,877,672)	0
	Jumlah Aset Tetap	50,136,816,371	(2,568,467,673)	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp683,910,417

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp683,910,417 dan Rp1,136,004,889 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	656,362,159	1,136,004,889
Utang Yang Belum ditagihkan	7,548,256	0
Uang Muka dari KPPN	20,000.000	0
Jumlah Kewajiban	683,910,417	1,136,004,889

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp656,362,159

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp656,362,159 dan Rp1,136,004,889 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Tanjungpandan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang Kepada Pihak ke Tiga	Rp656,362,159	0
2.			
3.			

Jumlah

Rp5,587,414,581

0

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum
Ditagihkan :
Rp7,548,258

Utang Yang Masih ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp7,548,256 dan Rp0 Uang tersebut merupakan Utang Yang Masih Belum ditagihkan oleh KPPN ke bendahara dan merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp20,000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp20,000.000 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNB
: Rp12,733,950

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp12,733,950 dan Rp203,514,079 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB per 30 Juni 2026 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,559,000	12,733,950	93.743
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		14,559,000	12,733,950	93.743

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp6,041,998,580

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6,041,998,580 dan Rp2,159,216.427 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	851,643,500	1,485,585,100	(34,576,420)	(1,32)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11,557	21,467	3,434	15,99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56,121,674	97,002,790	2,211,900	2,28
Beban Tunj. Anak PNS	16,868,822	31,153,770	(2,211,900)	(7,13)
Beban Tunj. Struktural PNS	12,160,000	28,140,000	2,222,880	(8.10)
Beban Tunj. Fungsional PNS	28,560,000	1,368,300,000	0	(45.10)
Beban Tunj. PPh PNS	5,293,478	140,054,268	229,200,000	16,75
Beban Tunj. Beras PNS	43,958,940	73,071,780	40,247,134	28,73
Beban Uang Makan PNS	116,095,000	271,813,000	11,080,260	15,16
Beban Tunjangan Umum PNS	11,680,000	6,290,000	(2,974,000)	(1,09)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	140,400,000	29,700,000	16,61
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,052,896,302	0	0	(24,17)
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	4,080,900,000	0	0	(85.10)
Belanja Gaji Pokok PPPK	119,303,825	0	0	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.980	0	0	0.00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,641,674	0	0	0.00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,921,554	0	0	0.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,825,585	0	0	0.00
Belanja Uang Makan PPPK	23,742,000	0	0	0.00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,866,250	0	0	0.00
Total Beban Pegawai	6,041,998,580	3,596,560,000	(30.892.359)	4.04

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp31,747,150

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp31,747,150 dan Rp36,086,025. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pegawai	6,041,998,580	2,495,251,484	3,546,747,096	142.14
Beban Persediaan	31,747,150	36,086,025	(4,338,875)	(12.024)
Beban barang dan Jasa	477,261,843	319,439,500	157,822,343	49.406
Beban bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban pemeliharaan	246,781,017	128,181,982	118,599,035	92.524
Beban Perjalanan Dinas	43,172,850	26,368,600	16,804,250	63.728
Beban Penyusutan dan Amortasi	2,593,188,922	2,607,358,551	(14,169,629)	(0.543)
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Jumlah Beban	(9,421,416,412)	(5,409,172,063)	(4,012,244,349)	74.175

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang Dan
Jasa :**
Rp477,261,843

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp477,261,843 dan Rp319,439,500. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban keperluan perkantoran	354,977,171	606,831,604	(57,350,163)	(9,54)
Beban Pengiriman surat	2,565,000	49,642,288	(19,076,388)	(38,44)

Dinas pos surat				
Beban Sewa	9,850,000	36.000,000	0	(0,00)
Beban Operasional satuan kerja	0	0	0	0
Beban Barang Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Beban langganan Listrik	86,569,672	0		
Beban Barang dan Jasa	477,261,843	740,336,364	(37,390,864)	(5.051)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp246,781,017

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp246,781,017 dan Rp128,181,982. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Sewa	9,850,000	0	0	(0,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,221,517	0	0	(0,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,044,000	158,323,000	(56,350,000))	(35,37)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	76,450,204	33,385,041	43,66
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	18,833,100	(2,876,600)	(15,75)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0

Jumlah	246,781,017	383,028,256	30,076,194	7.852
--------	-------------	-------------	------------	-------

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp43,172,850

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp26,368.600 dan Rp66,689.467. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	43,172,850	34,169.785	2,476.598	7.248
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	43,172,850	34,169.785	2,476.598	7.248

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0

Masyarakat/Pemda

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi :
Rp2,593,188,922*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2,593,188,992 dan Rp2,607,358,551. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,593,188,922	2,607,358,551	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Jumlah Beban dan Amortisasi	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,593,188,922	2,607,358,551	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih

per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	15,719.596	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain :
Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2026	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Operasional : Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2026

adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Operasional
Per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Surplus/defisit Pelepasan Aset	0	0	0	0
Jumlah beban	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Jumlah Surplus(defisit) dari kegiatan Operasional	(5,188,548,467)	(3,034.083.742)	42,279.879	(1.394)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp51,,569,279,155 dan Rp57,925,961,282.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp(9,402,947,412) dan Rp(5,407,826,970) Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp7,315,251,361 dan Rp2,400,749,502 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ekuintas Awal	51,569,279,155
Surplus/Defisit-LO	(9,402,947,412)
Transaksi Antar Entitas	7,315,251,361)
Kenaikan Penurunan Ekuintas	(2,087,696,051))
Lain - Lain	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0

Selisih Revaluasi Aset	0
Selisih Revaluasi Aset	0
Penyesuain Nilai Aset	0
Koreksi Yang Menambahkan/Mengurangi Ekuitas	0
Ekuitas Akhir	49,481,583,104

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN) Pada periode hingga 30 Juni 2026 DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, sebesar Rp0 dan Tahun 2025 sebesar Rp 0 yang diterima sepanjang tahun 2026 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	0
2	Pemda Kab Beltim	Barang	0

E.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp51,569,279,155 dan Rp49,481,583,104 dan 2025 Rp57,925,961,282 dan Rp54,918,847,814.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tidak ada Kejadian Penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan keuangan 30 Juni 2026 ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak ada pengungkapan lainnya pada DIPA 400600

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Ada Temuan dan Tindak Lanjut temuan BPK yang layak untuk dijadikan catatan Dalam Laporan Keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak adanya pendapatan dan Belanja secara Akrual pada semester 30 Juni 2026

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanjung Pandan adalah:

1. PT BRI (Persero) Cabang Tanjungpandan A/C 0131-01-000117-30-9 a.n. BPg 107 PN Tanjungpandan (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA

F.2.4. Revisi DIPA

DATA REVISI ANGGARAN 30 JUNI TAHUN 2026

DIPA 400600

Revisi Ke	Tgl Revisi	Alasan Revisi	Anggaran		Ket
			Semula	Menjadi	
1	02 Januari 2026	• Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	5.858.851.000	5.858.851.000	KPA
2	03 Februari 2026	• Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	5.858.851.000	5.858.851.000	KPA

3	19 Februari 2026	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	5.858.851.000	5.858.851.000	KANWIL PANGKAL PINANG
4	09 April 2026	Antar-Bagian Anggaran - Pergeseran Anggaran dari BA BUN ke BA K/L	5.858.851.000	11.846.896.000	DJA
5	06 Mei 2026	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	11.846.896.000	11.846.896.000	KANWIL PANGKAL PINANG
6	17 Juni 2026	- Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional - Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan - Pergeseran Anggaran Antar-Satker	11.846.896.000	12.145.219.000	PA

F.2.5. SSBP, dan SSPB

Tidak adanya Perubahan Akun

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada Catatan Penting lainnya

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2026	TA 2025	TA 2024	TA 2023
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat	-					
2	Alat Kantor	-					
3	Alat Rumah Tangga	-					
4	Alat Komunikasi	-					
5	Unit Alat Laboratorium	-					
6	Komputer Unit	-					
7	Alat Pengolah Data	-					
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-					
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-					
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						

1Jalan	-						
D. Aset Tetap Lainnya							
1Bahan Perpustakaan Tercetak	-						
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan							
1Alat Kantor	-						
2Alat Rumah Tangga	-						
3Komputer Unit	-						
4Peralatan Komputer	-						
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap							
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya							

B. Daftar Hibah Langsung

DAFTAR DAN LAMPIRAN

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2026
BAGIAN ANGGARAN 005.01

Daftar Isi

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

LRA belanja dan Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan Basis Kas Saldo Awal

Neraca Percobaan Basis Kas Berjalan

Neraca Percobaan Basis Akrua Saldo Awal

Neraca Percobaan Basis Akrua Berjalan

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Posisi BMN di Neraca

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud per Kelompok

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan per Kelompok

Laporan Barang Persediaan

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Laporan Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga Per 30 Juni TA 2026

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga Per 30 Juni TA 2026

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 30 Juni Tahun Anggaran 2026

Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 30 Juni Tahun Anggaran 2026

Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi BMN

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Bukti Setor Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada per 30 Juni Tahun 2026

Rekening Koran per 30 Juni Tahun Anggaran 2026

Berita Acara Opname Fisik Persediaan

Kertas Kerja Telaah

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 11:37 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,733,950	203,514,079	(190,780,129)	(93.743)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,733,950	203,514,079	(190,780,129)	(93.743)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,733,950	203,514,079	(190,780,129)	(93.743)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,041,998,580	2,495,251,484	3,546,747,096	142.14
Beban Persediaan	31,747,150	36,086,025	(4,338,875)	(12.024)
Beban Barang dan Jasa	477,261,843	319,439,500	157,822,343	49.406
Beban Pemeliharaan	246,781,017	128,181,982	118,599,035	92.524
Beban Perjalanan Dinas	43,172,850	26,368,600	16,804,250	63.728
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
 Tgl Cetak : 27/07/26 11:37 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,593,188,922	2,607,358,551	(14,169,629)	(0.543)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,434,150,362	5,612,686,142	3,821,464,220	68.086
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,421,416,412)	(5,409,172,063)	(4,012,244,349)	74.175
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	619,000	1,309,000	(690,000)	(52.712)
Pendapatan Pelepasan Aset	619,000	1,309,000	(690,000)	(52.712)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,850,000	93	17,849,907	19,193,448.38
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,850,000	93	17,849,907	19,193,448.38
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	18,469,000	1,309,093	17,159,907	1,310.824
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)	(3,995,084,442)	73.875
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)	(3,995,084,442)	73.875

Keterangan :

FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



Ilman Saparis Prabakti

NIP 196905042000121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 11:44 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	51,569,279,155	57,925,961,282	(6,356,682,127)	(10.97)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,402,947,412)	(5,407,862,970)	(3,995,084,442)	73.88
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,315,251,361	2,400,749,502	4,914,501,859	204.71
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,087,696,051)	(3,007,113,468)	919,417,417	(30.57)
EKUITAS AKHIR	49,481,583,104	54,918,847,814	(5,437,264,710)	(9.9)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Ilman Saparis Prabakti

NIP 196905042000121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN 400600

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 11:44 AM
Halaman : 1
lap_jra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	14,559,000	29,744,150	15,185,150	204	18,995,000	318,781,172	(299,786,172)	1,678
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,559,000	29,744,150	15,185,150	204	18,995,000	318,781,172	(299,786,172)	1,678
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	14,559,000	29,744,150	15,185,150	204	18,995,000	318,781,172	(299,786,172)	1,678
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	12,145,219,000	7,333,174,262	(4,812,044,738)	60	4,983,561,000	2,719,530,674	2,264,030,326	55
1. Belanja Pegawai	10,369,498,000	6,504,293,141	(3,865,204,859)	63	3,612,477,000	2,240,906,592	1,371,570,408	62
2. Belanja Barang	1,760,721,000	815,981,121	(944,739,879)	46	1,257,543,000	478,624,082	778,918,918	38
3. Belanja Modal	15,000,000	12,900,000	(2,100,000)	86	113,541,000	0	113,541,000	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN 400600

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 11:44 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc



URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	12,145,219,000	7,333,174,262	(4,812,044,738)	60	4,983,561,000	2,719,530,674	2,264,030,326	55
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

Irfan Separis Prabakti
NIP. 196905042000121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 11:45 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	1,458,800	0	1,458,800	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,458,800	0	1,458,800	0.00
Persediaan	7,218,350	0	7,218,350	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	28,677,150	0	28,677,150	
ASET TETAP				
Tanah	32,199,474,000	32,199,474,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,453,170,931	2,426,760,932	26,409,999	1.09
Gedung dan Bangunan	28,203,643,578	28,203,643,578	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,559,628	9,559,628	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,729,031,766)	(10,134,154,094)	(2,594,877,672)	25.61
JUMLAH ASET TETAP	50,136,816,371	52,705,284,044	(2,568,467,673)	(4.87)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	767,000	767,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(767,000)	(767,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	50,165,493,521	52,705,284,044	(2,539,790,523)	(4.82)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	656,362,159	1,136,004,889	(479,642,730)	(42.22)
Utang Yang Belum Ditagihkan	7,548,258	0	7,548,258	0.00
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	683,910,417	1,136,004,889	(452,094,472)	(39.80)
JUMLAH KEWAJIBAN	683,910,417	1,136,004,889	(452,094,472)	(39.80)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	49,481,583,104	51,569,279,155	(2,087,696,051)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	49,481,583,104	51,569,279,155	(2,087,696,051)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	49,481,583,104	51,569,279,155	(2,087,696,051)	(4.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50,165,493,521	52,705,284,044	(2,539,790,523)	(4.82)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



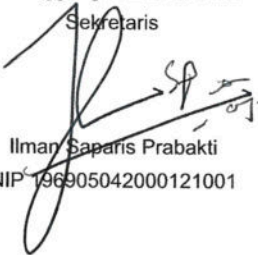
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 11:45 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Ilman Saparis Prabakti
NIP 196905042000121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 11:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,333,174,262
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	29,744,150	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	619,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,522,350
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8,752,800
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,850,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	851,643,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,557	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56,121,674	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,868,822	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,560,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,293,478	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43,958,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	116,095,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,680,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,052,896,302	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4,080,900,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	119,303,825	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,980	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,641,674	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,921,554	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,825,585	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	23,742,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,866,250	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	354,531,171	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,156,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	23,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,169,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	103,326,841	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,850,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,044,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	104,312,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116,546,517	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,745,592	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,900,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 11:46 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			7,362,918,412	7,362,918,412

Keterangan :
FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris
Ilman Saparis Prabakti
196905042000121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 11:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,458,800	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,226,350	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	992,000	0
0.0	131111	Tanah	32,199,474,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,453,170,931	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	28,203,643,578	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,559,628	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,321,774,394
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,407,257,372
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	767,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	767,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	656,362,159
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	7,548,258
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,333,174,262
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,744,150	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,821,249
0.0	391111	Ekuitas	0	51,569,279,155
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	619,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,522,350
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,211,600
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,850,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	960,842,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,961	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63,305,244	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,008,322	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	32,130,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,293,478	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	49,462,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	94,953,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,140,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	75,600,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	883,216,169	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,648,800,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	135,759,525	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 11:46 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,356	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,143,974	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,186,596	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,767,045	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	23,742,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,951,250	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	354,977,171	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,565,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	23,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	86,569,672	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,850,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,044,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	104,312,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,221,517	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43,172,850	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69,497,699	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,523,691,223	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	31,747,150	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,203,500	0
JUMLAH			72,359,186,799	72,359,186,799

Keterangan :

FINAL

Tanjungpandan, 27 Juli 2026
 Penanggung Jawab BAKPA
 Sekretaris

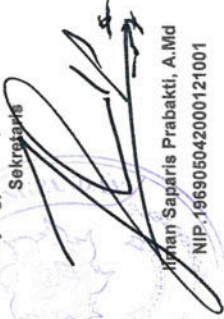
 Ilman Saparis Prabakti
 NIP. 196905042000121001

DATA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIPA 01
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NO	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	STATUS TNP	SALDO PER 30 Juni 2026
1	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	005	01	VA	653244006001000	BPg 107 PN Tanjung Pandan (01)	PT BRI (Persero) Cabang Tanjungpandan		Rp -

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Sekretaris



Hutan Saparis Prabakti, A.Md

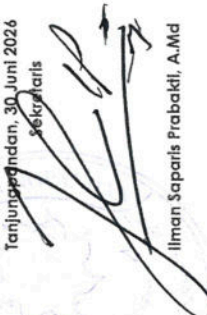
NIP.196905042000121001

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN per 30 Juni TAHUN 202

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SATKER : : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NO	KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TAHUN ANGGARAN	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	3000	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	2026	-	-	-	-	-

Tanjungpandan, 30 Juni 2026
Sekretaris

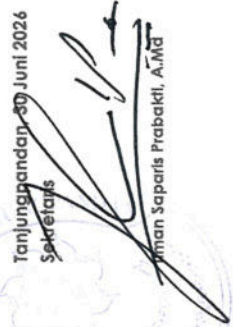


Ilman Saparis Prabakiti, A.Md

RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN per 30 Juni 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SATKER : : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		

Tanjungpandan, 30 Juni 2026
Sekretaris

Aman Saparitis Prabakti, A.Md

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 Juni 2026

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ESI	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
1	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	005	01	-	-	-	-	-	-

Tanjungpandan, 30 Juni 2026
Sekretaris



Ilham Saparis Prabakti, A.Md
NIP.196905042000121001

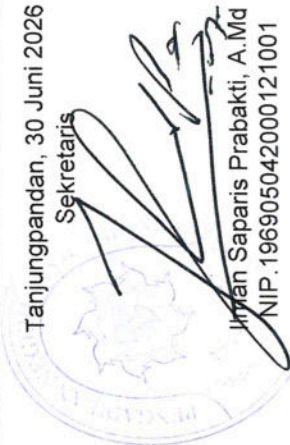
DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH per 30 Juni TAHUN 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 400600 PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Sekretaris



Iman Saparis Prabakti, A.Md
 NIP.196905042000121001

**RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 Juni 2026**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan	
					TUNAI	Saldo Bank				Total
						Saldo	Bank dan No Rek			
1	3000	BANGKA BELITUNG	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	Rp	-	Rp	-		
JUMLAH					-	-	-	-		

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

 Sekretaris

 Irfan Saparis Prabakti, A.Md
 NIP.196905042000121001

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 Juni 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026					Keterangan
					TUNAI	Saldo			Total	
							Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	Rp	-	-	-	Rp	-
JUMLAH					-	-	-	-	-	-

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Sekretaris

Iman Saparis Prabakti, A.Md

NIP.196905042000121001

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 400600 PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDA

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank			
						Saldo	Bank dan No Rek	Total	
1	3000	Bangka Belitung	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	Rp 12.451.742	-	Rp 12.451.742	-	

Tanjungpandan, 30 Juni 2026

Sekretaris



Ilman Saparis Prabakti, A.Md
NIP.196905042000121001

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH per 30 Juni TAHUN 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 400600 PENGADILA NEGERI TANJUNGPANDAN

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET

Tanjungpandan, 30 Juni 2026
Sekretaris



Iman Saparis Prabakti, A.Md
NIP.196905042000121001



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN (400600)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653244006001000 | BPG 107 PN TANJUNG PANDAN 01
Periode : 01-06-2026 s/d 30-06-2026

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-05	14:39:39	55084197	From 032901003295305 to 653244006001000 Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang 261070000004045000001	0,00	0,00	18.479.500,00	18.479.500,00	SPAN	
2026-06-05	15:08:06	55086441	From 653244006001000 to - TARIK TUNAI transfer ke -	18.479.500,00	18.479.500,00	0,00	0,00	INDS	
2026-06-17	16:22:01	55683620	From 653244006001000 to 653244006001000 SETORAN_65324_4006001000 653244006001000 dari 653244006001000	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	BRIVA	
2026-06-22	14:24:46	55992177	From 032901003295305 to 653244006001000 Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang 261070000004437000001	4.050.000,00	0,00	14.875.000,00	18.925.000,00	SPAN	
2026-06-22	14:52:55	55996172	From 653244006001000 to - TARIK TUNAI transfer ke -	18.925.000,00	14.875.000,00	0,00	4.050.000,00	INDS	
2026-06-22	14:54:18	55996500	From 653244006001000 to - UANG TRANSPORT HAKIM MEI2026 transfer ke -	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	INDS	
2026-06-29	11:53:01	56209338	From 032901003295305 to 653244006001000 Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni untuk Keperluan Belanja Barang 261070000004632000001	0,00	0,00	19.857.748,00	19.857.748,00	SPAN	
2026-06-29	14:50:13	56218725	From 653244006001000 to - TARIK TUNAI transfer ke -	19.857.748,00	19.857.748,00	0,00	0,00	INDS	
Total Mutasi					57.262.248,00	57.262.248,00			
Saldo Akhir							0,00		

DATA REVISI ANGGARAN SEMESTER 1 TAHUN 2026

DIPA 400600

Revisi Ke	Tgl Revisi	Alasan Revisi	Anggaran		Ket
			Semula	Menjadi	
1	02 Januari 2026	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	5.858.851.000	5.858.851.000	KPA
2	03 Februari 2026	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	5.858.851.000	5.858.851.000	KPA
3	19 Februari 2026	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	5.858.851.000	5.858.851.000	KANWIL PANGKAL PINANG
4	09 April 2026	Antar-Bagian Anggaran - Pergeseran Anggaran dari BA BUN ke BA K/L	5.858.851.000	11.846.896.000	DJA
5	06 Mei 2026	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	11.846.896.000	11.846.896.000	KANWIL PANGKAL PINANG
6	17 Juni 2026	- Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional - Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan - Pergeseran Anggaran Antar-Satker	11.846.896.000	12.145.219.000	PA

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

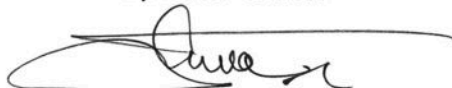
Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 400601 Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Eliminasi Saldo RPL Bulan Desember 2025 (12
 Kategori Jurnal Penyesuaian bulan)

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☒ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ Dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Kredit	Rupiah Debet
1	111825	Jurnal Balik rpl awal tahun kas lainnya di bendahara penerima	96,439.478	-
2	212192	Saldo Kas lainnya dibendahara penerimaan	-	96,439.478

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ilman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 4006001Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal balik tagihan pos bulan desember 2025 yang
 Kategori Jurnal Penyesuaian : dibayarkan bulan Januari 2026

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	521114	Jurnal Balik awal tahun tagihan pos tahun 2025	4.756,000	-
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	-	4.756,000

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI

Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Ilman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 400600 Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Beban Langganan Listrik 31 Desember 2025
 Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	522111	Jurnal balik awal tahun tagihan pemakaian Listrik	16.757,169	-
2	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	16.757,169

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Iman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

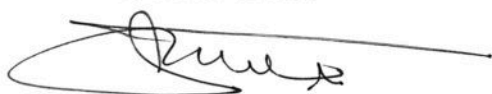
Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 400600 Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 006
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Akrual kekurangan belanja pegawai bulan Oktober
 Kategori Jurnal Penyesuaian s.d Desember 2025

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511339	Jurnal Balik awal tahun kekurangan gaji hakim bulan oktober s.d desember tahun 2025	840.300,000	-
2	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	840.300,000

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ilman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Adminidtrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 4006000Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 007
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Akrual tagihan pos bulan desember 2025 yang
 Kategori Jurnal Penyesuaian dibayarkan bulan Januari 2026

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	521114	Jurnal balik awal tahun tagihan dinas pos pusat	591.000	-
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	-	591.000

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ilman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah : 3000 Bangka Belitung
Satuan Kerja : 400600 Pengadilan Negeri Tanjungpandan
No. Dokumen : 008
Tanggal : 30 Juni 2026
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal uang makan bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | ☐ Kas di Bendahara Penerimaan |
| ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan |
| ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar | ☐ Persekot Gaji |
| ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | ☐ Selisih Kurs |
| ☐ Penyusutan dan Amortisasi | ☐ Transfer |
| ☐ Persediaan | ☐ Reklasifikasi |
| ☐ Uang Muka Belanja | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | ☐ Koreksi Lainnya |
| ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang | ☐ dst |

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511129	Jurnal balik awal tahun pembayaran Uang makan PNS	21.142,000	-
2	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	21.142,000

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI

Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Ilman Saparis Prabakti

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

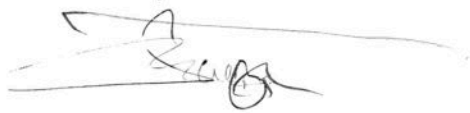
Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 400600 Pengadilan Negeri Tanjungpandan
 No. Dokumen : 009
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Akrual kekurangan tunjangan hakim bulan Oktober
 Kategori Jurnal Penyesuaian s.d Desember 2025

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511324	Jurnal balik awal tahun kekurangan gaji hakim	257,214.720	-
2	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	257,214.720

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



Yan Firman

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Ilman Saparis Prabakti

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-005.01.2.400600/2026

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (30.01) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BELITUNG

KPPN : (107) Tanjung Pandan

Satuan Kerja : (400600) PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 12.451.742,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00043/SSP/400600/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	18.200.000,00	107.987.977,00	113.736.235,00	12.451.742,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	18.200.000,00	107.987.977,00	113.736.235,00	12.451.742,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	18.200.000,00	54.775.729,00	60.523.987,00	12.451.742,00
	1. BP UP*)	18.200.000,00	53.212.248,00	58.960.506,00	12.451.742,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.563.481,00	1.563.481,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 7.548.258,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

- II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	12.451.742,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	12.451.742,00	

- III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	12.451.742,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	12.451.742,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	12.451.742,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	7.548.258,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui

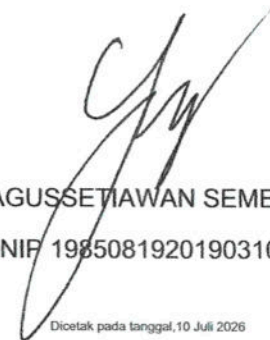
Kuasa Pengguna Anggaran



Fitrian Saparis Prabakti
NIP 196905042000121001

KAB. BELITUNG, 30 Juni 2026

Bendahara Pengeluaran



YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI
NIP 198508192019031005

Dioetab pada tanggal 10 Juli 2026

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Kode UAPPA-W dan Nama UAPPA-W : (005.01.3000) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Kode UAPPA dan Nama UAPPA : (400600) Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) sesuai PMK 222/2016	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2, LRA, Neraca, LO, dan LPE face	✓		Ada
3, Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
2, Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1, Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE, dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2, Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LPE	✓		Sama
3, Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECHEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (cek di e-Rekon&LK, menu Daftar>>Akun Non Ref)		✓	Tidak
2, Adakah "Saldo Tidak Normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang" dan "Aset yang Belum Diregister"		✓	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1XXXXX)	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah Akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di KL/L tersebut, misal			
1, Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau piutang BLU layanan kesehatan di Kementerian Dikti.		✓	Tidak
2, Adakah Akun 1xxxxx hingga 115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya akun dari 116xx hingga 119xx, selain adanya akun BUN)		✓	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
2, Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		✓	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2XXXXX)		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1, Adakah saldo 218211-Hibah Langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (cek di neraca percobaan saldo awal)			√	Ya/Tidak
2, Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah nilainya sama dengan akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada 30 Juni 2026 (untuk mengecek akun 391133, cetak di Neraca Percobaan Tahun 2021)	N/A	N/A		Ya
3, Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 diakhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Tidak
Sehubungan dengan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4, Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya <akun 218211?	N/A	N/A		Ya
AKUN EKUITAS (3XXXXX)		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			√	Tidak
2, Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. di RRI, TVRI, dan POLRI			√	Tidak
3, Adakah saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	N/A	N/A		Ya
4, Adakah saldo akun 391151-Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			√	Ada/Tidak
5, Jika ada, Apakah saldo akun 391151-Koreksi Atas Reklasifikasi ersediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	N/A	N/A		Ya
6, Apakah saldo akun 391131-Pengesahan hibah langsung > akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	N/A	N/A		Ya
Saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan rekals masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-Rekon				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 312211-Transfer Keluar (TK)		Ya	Tidak	Seharusnya
1, Nilai Absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			Rp0	
Selisih secara absolut diperoleh dari e-erekon & LK (menu monitoring>>Tranfer Masuk/Transfer Keluar), dengan menggunakan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TK/TM secara absolut tersebut?				
2, Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			Rp0	
AKUN PENDAPATAN (4XXXXX)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41XXXX)		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?			√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 423xxx (Pendapatan Non Perpajakan)?			√	Tidak
2, Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			√	Tidak
3, Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			√	Tidak
4, Adakah akun 425xxx khusus Bun? Yaitu 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			√	Tidak
Pengecekan Akun Yang Tidak Sesuai Karakteristik Tupoksi Entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun yang tidak normal keberadaanya? Misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			√	Tidak
2, Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya di KL? Seharusnya 425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			√	Ya/Tidak

2, Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban bunga, Subsidi, Hibah dan lain-lain)?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum disahkan"		√	Tidak
2, Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-Rekon? (cek pada aplikasi e-rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Jika TIDAK memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2, Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3, Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp		-
2, Isi kolom di sebelah kanan sald akun 593311	Rp		-
3, Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp		-
4, Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara : membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.			
5, Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk (M07)		√	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07			
6, Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19?	√		Ya/Tidak
7, 19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi COVID-19?	√		Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2, Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3, Adakah beban bunga		√	Tidak
4, Adakah beban subsidi		√	Tidak
5, Adakah beban hibah		√	Tidak
6, Adakah beban transfer		√	Tidak
7, Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ya	Tidak	Seharusnya
8, Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9, Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/PB/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10, Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	N/A	N/A	Ya
Jia hasil di atas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih di atas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
1, Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			

2, Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
<i>Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119</i>			
1, Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
<i>Pengungkapan 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) adanya transaksi normalisasi BMN diaplikasi SIMAK BMN terkait dengan nilai perolehan minus pada Rumah Negara pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan</i>			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2, Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "All" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan akun beban (D/K)</i>			
Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2026 dengan 31 Desember 2025 adakah			
3, Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4, Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2020, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

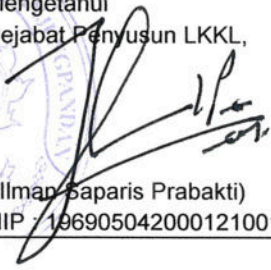
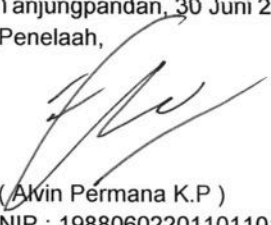
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2, Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A	N/A	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	N/A	N/A	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
3, Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A	N/A	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4, Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5, Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi Penyusutan AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6, Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ada/Tidak
- Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7, Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
- Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8, Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9, Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10, Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada/Tidak
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2, Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan 30 Juni 2026 di e-Rekon&LK? maupun absolut		√	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal positif)			
3, Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4, Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , 1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	√		
MENU DAFTAR BMN	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah nilai perolehan minus (intrakomptabel)		√	Tidak
2, Berapa NUP BMN dengan nilai perolehan minus ? (diisi jumlah NUP)			-
3, Berapa total nilai BMN dengan nilai perolehan minus ? (diisi nilai rupiahnya)			-

4, Adakah nilai buku minus (intrakomptabel) ?		√	Tidak
5, Berapa NUP BMN dengan nilai buku minus ? (diisi jumlah NUP)	-		
6, Berapa total nilai BMN dengan nilai buku minus ? (diisi nilai rupiahnya)	-		
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")	√		Tidak
2, Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1, Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2, Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3, Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4, Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak " bersaldo		√	Tidak
5, Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6, Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPKA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			
SATKONS DAN PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah jurnal 30 Juni 2026 telah diselesaikan	N/A	N/A	
2, Apakah sudah dilakukan jurnal Take-In Reval dengan benar?	N/A	N/A	
Cek kebenaran apabila ada jurnal baru di 30 Juni Tahun 2026			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2, Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen " pendukung terkait?	√		Ya
3, Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4, Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5, Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6, Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A	N/A	Ya
7, Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8,			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1, Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2, Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan ' Neraca?	√		Ya
3, Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4, Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5, Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif, pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.			
6, Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A	N/A	Ada
7, Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ada
8, Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ada
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2, Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDPTPengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	√		Ya
3, Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2019	√		Ya
4, Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)	√		Ada
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA	Ya	Tidak	
1, Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi ' DIPAterkait penanganan Pandemi Covid-19	√		
2, Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp.94.170.000		
3, Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
4, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPNBP) ' khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
5, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi ' Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
6, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi 1 Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA	Ada	Tidak	
7, Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak ' dan/atau PNBPNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19	√		
8, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi ' Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
9, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi ' Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA	Ada	Tidak	

10, Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk - Transfer Kefuar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin ' berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		√
11, Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, ' barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA	Ada	Tidak
12, Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		√
a. Kenaikain penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		√
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		√
11, Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain:		√
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		√
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghosilkan perhitungan yang tidak sama dengan ramus Namun perlu di analisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.		
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN		
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon & LK</i>		
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Ilman Saparis Prabakti) NIP : 196905042000121001	Tanjungpandan, 30 Juni 2026 Penelaah,  (Alvin Permana K.P) NIP : 198806022011011010	